



Jurnal Akuntansi

Volume 2 – Nomor 1, Juni 2014

**PENGARUH KOMITMEN TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR:
MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR BPK WILAYAH YOGYAKARTA)**
Abdullah

**INFORMASI ASIMETRI DAN DESENTRALISASI TERHADAP
HUBUNGAN PARTISIPASI ANGGARAN DAN *BUDGETARY SLACK***
Isma Coryanata

FAKTOR PENENTU PENCAPAIAN KINERJA AUDITOR PEMERINTAH
Halimatusyadiah

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU**
Henny Pebriyani
Fadli

**PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AUDIT, AUDIT *TENURE*,
DISCLOSURE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN
OPINI AUDIT BERKAITAN DENGAN GOING CONCERN**
Viny Hardiyanti
Darnan Usman

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DI PROVINSI BENGKULU**
Dian Purnama Sari
Fitrawati Ilyas

Jurnal Akuntansi

Volume 2, Nomor 1, Juni 2014

Terbit 3 kali dalam setahun pada bulan Februari, Juni, dan Oktober. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian atau pemikiran akuntansi akademisi, praktisi, mahasiswa dan lain yang relevan bagi pengembangan profesi dan praktek akuntansi di Indonesia.

Penyunting (Editors)

Fadli (*Chief Editor*)

Saiful (*Chief Managing Editor*)

Husaini

Abdullah

Nikmah

Mitra Bestari/Penelaah (Reviewers)

Sylvia Veronica NP. Sinaga (Universitas Indonesia)

Dwi Martani (Universitas Indonesia)

Ersa Tri Wahyuni (Universitas Padjajaran)

Soekrisno Agoes (Universitas Tarumanegara)

Abdul Rohman (Universitas Diponegoro)

Tarjo (Universitas Trunojoyo Madura)

Joni Pabelum (Universitas Palangka Raya)

Sekretariat (Editorial Secretary)

Dri Asmawanti S

Kantor Penyunting (Editorial Office)

Jurusan Akuntansi FE-UNIB

Gedung K, Jln. WR.Supratman Kandang Limun Bengkulu

Telp. 0811 731434

E-mail: jafebunib@yahoo.com

Jurnal Akuntansi, Edisi pertama sejak 2011

Oleh Jurusan Akuntansi FEB-UNIB

Redaksi menerima sumbangan tulisan hasil penelitian yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi 1.5 dengan jumlah 20-30 halaman kertas A4, dengan format seperti yang tercantum pada Kebijakan Editorial

Jurnal Akuntansi

Volume 2, Nomor 1, Juni 2014

PENGARUH KOMITMEN TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR:
MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR BPK WILAYAH YOGYAKARTA)
Abdullah

INFORMASI ASIMETRI DAN DESENTRALISASI TERHADAP
HUBUNGAN PARTISIPASI ANGGARAN DAN *BUDGETARY SLACK*
Isma Coryanata

FAKTOR PENENTU PENCAPAIAN KINERJA AUDITOR PEMERINTAH
Halimatusyadiah

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU
Henny Pebriyani
Fadli

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AUDIT, AUDIT *TENURE*,
DISCLOSURE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN
OPINI AUDIT BERKAITAN DENGAN GOING CONCERN
Viny Hardiyanti
Darman Usman

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DI PROVINSI BENGKULU
Dian Purnama Sari
Fitrawati Ilyas

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI
ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU**

Henny Pebriyani

Fadli

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) on a Human Development Index (HDI) in the District/City of Bengkulu Province. The sample used in this study is the budget realization report districts/municipalities in the province of Bengkulu listed and published on the official website of the Directorate General of Fiscal Balance and Local Government and from Central Bureau of Statistics with the observations from 2008-2012. Analysis of data using analysis tools and multiple regression test was preceded by the classical assumption of normality test, multicollinearity, autocorrelation and heterocedasticity test. Hypothesis testing is done by using the F test and t test.

The results of hypothesis testing shows of local revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) has a positive effect on the Human Development Index (HDI), while Special Allocation Fund (DAK) has no effect on the Human Development Index (HDI).

Keywords: Human Development Index (HDI), Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK)

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara maka membutuhkan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Mudrajad, 2006 dan Todaro, 2009). Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan dan kesehatan serta juga perekonomian suatu wilayah atau Negara yang semakin membaik. Oleh karena itu, sebagian besar negara, baik maju maupun berkembang banyak yang menggunakan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk menilai kualitas sumberdaya manusia.

Pembangunan manusia menjadi penting dan perlu mendapat perhatian sebab pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup masyarakat secara luas, sehingga keberhasilan pembangunan seringkali dilihat dari pencapaian kualitas Sumber Daya Manusianya. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu Negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India *Amartya Sen* dan *Mahbub ul Haaki* seorang ekonom Pakistan dibantu oleh *Gustav Ranis* dari *Yale University* dan *Lord Meghnad Desai* dari *London School of Economics*. IPM merupakan suatu indeks komposit berdasarkan empat indikator, yaitu : angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (http://id.m.wikipedia.org/wiki/indeks_pembangunan_manusia).

Bengkulu sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi. Dimana, setiap tahun di Kabupaten/ Kota Provinsi Bengkulu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dengan meningkatnya IPM tersebut akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Bengkulu. Salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan pengaturan distribusi serta percepatan realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang di dalamnya mencakup sumber-sumber pendapatan daerah dan ada juga berbagai pengeluaran pemerintah. Pengelolaan dana daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain sebagainya dalam bentuk penerimaan daerah. Dengan demikian, meningkatnya PAD, DAU dan DAK di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, maka akan mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan IPM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini akan dilakukan pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu untuk periode 2008-2012. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam melihat Indeks Pembangunan Manusia dalam hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan agar PAD, DAU dan DAK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan IPM.

2 KERANGKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004, Pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) dana yang bersumber yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum (DAU) terdiri dari: DAU untuk daerah Provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskal besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah tercermin dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009 dalam Rahmawati 2010).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 27 mengenai DAU menyatakan bahwa :

- Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN,
- DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, dan
- Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil di daerah.

2.3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBD yaitu:

- a. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan
- b. Kegiatan khusus sebagaimana dimaksudkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN

Kriteria dalam DAK meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Untuk perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui dengan dua tahap yaitu dengan penentuan daerah tertentu yang diterima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia (Suyanto, 2009). Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan *Human Development Index* (HDI) adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

2.5. Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Bau (2011). Bau meneliti kabupaten/kota di provinsi DIY (2005-2009) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap IPM. Sembiring (2011) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) dengan hasil penelitian ini menemukan bahwa DAU, DAK, dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro (2013) di Jawa Timur menemukan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu pada tahun 2008-2012, meliputi 9 Kabupaten dan 1 Kota. Alasan peneliti mengambil observasi dari tahun 2008-2012 karena kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2008, merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian data yang menjadi observasi oleh peneliti bisa terpenuhi semua berupa data IPM dan LRA tiap kabupaten dan kota. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran secara berturut-turut per 31 Desember dari tahun 2008-2012.
2. Memiliki data IPM yang lengkap dan konsisten selama 2008-2012.
3. Memiliki data lengkap yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini dan secara konsisten. Data-data tersebut meliputi tentang data PAD, DAU dan DAK.

Jenis data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel (gabungan data *cross section* dan *time series*). *Cross section* yang digunakan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, sedangkan *time series* yang digunakan berupa data sekunder tahunan periode 2008-2012. Data tersebut berupa *softcopy* Laporan Realisasi Anggaran dan *softcopy* Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda, dengan model matematis sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

- IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia
- β_{1,2,3} = Koefisien regresi
- PAD_{it} = Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- DAU_{it} = Rasio Dana Alokasi Umum (DAU)
- DAK_{it} = Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK)
- ε = error

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 21. Pengujian yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokolerasi), uji t dan kelayakan model serta koefisien determinasi (R^2).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1.
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi
PAD	14869101908,16	9870133171,66
DAU	297821429237,04	70850235533,39
DAK	43482948600,00	12098087150,08
IPM	70,90	2.990

Berdasarkan tabel di atas, variabel DAU mempunyai standar deviasi terbesar (70.850.235.533,39) dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Standar deviasi merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari nilai *mean*.

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokolerasi dengan hasil yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Hasil Uji Asumsi Klasik - Output Uji Normalitas Data

Variabel	N	Signifikansi	Keterangan
PAD	45	0,191	Normal
DAU	45	0,692	Normal
DAK	45	0,683	Normal
IPM	45	0,259	Normal

Dari hasil di atas secara umum *p-value* nya lebih besar dari 0,05 dan ini menunjukkan data yang digunakan adalah normal.

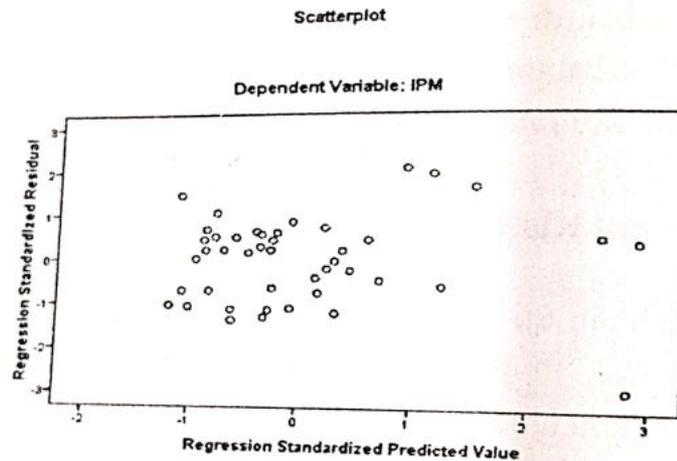
4.3. Output Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas ini, yaitu dengan melihat besarnya nilai *tolerance value* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* mendekati angka satu, ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Ringkasan hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4.3.
Hasil pengujian Multikolinearitas

Persamaan	Collinearity Statistics		Ket
	Tolerance	VIF	
1. PAD	0,365	2,736	Bebas
2. DAU	0,366	2,735	Bebas
3. DAK	0,997	1,003	Bebas

Dari hasil tabel 4 dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi multikolinearitas.



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan data terdistribusi normal yang dibuktikan dengan nilai signifikansi PAD sebesar 0,191, DAU sebesar 0,692, DAK sebesar 0,683, dan IPM sebesar 0,259 ($> 0,05$). Hasil pengujian multikolinieritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* (0,365; 0,366; 0,997) untuk semua variabel lebih besar dari 0,1 dan begitu juga nilai VIF (2,736; 2,735; 1,003) untuk semua variabel lebih kecil dari 10. Hal ini berarti model-model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Selanjutnya, hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *scatterplots* terlihat menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Dan terakhir, hasil pengujian autokorelasi menunjukkan nilai DW (Durbin-Watson) yang dihasilkan adalah sebesar 1,580, sementara dengan jumlah $N = 45$ diperoleh nilai $dL = 1,3832$ dan $dU = 1,6662$. Nilai DW sebesar 1,580 tersebut terletak di antara nilai dL (1,3832) dan dU (1,6662), sehingga pada variabel-variabel model di atas tidak dapat disimpulkan. Ini berarti data penelitian tidak dapat ...

4.4. Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini secara ringkas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
2 (Constant)	-5,327	26,580		-.200	.842
NPAD	.2,264	.710	.465	3.187	.003
NDAU	3,342	1,655	.295	2.019	.050
NDAK	-2,494	1,056	-.251	-2.363	.023
F	16.371				
Sig F	0.000				
R Square	0.551				
Adjusted R Square	0.517				

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel tersebut, PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceterisparibus*), maka setiap kenaikan satu persen pendapatan asli daerah akan meningkatkan 2,264 persen indeks pembangunan manusia Kab/Kota di Provinsi Bengkulu. Dimana hasil pengujian hipotesis statistik t, nilai signifikannya sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya pada hipotesis pertama **diterima**.

Selanjutnya untuk variabel DAU berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceterisparibus*), maka setiap kenaikan satu persen dana alokasi umum akan meningkatkan 3,342 persen indeks pembangunan manusia Kab/Kota di Provinsi Bengkulu. Dimana hasil pengujian hipotesis statistik t, nilai signifikannya sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya sama besar 0,05. Kesimpulannya pada hipotesis kedua **diterima**. Hasil pengujian berikutnya menunjukkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceterisparibus*), maka setiap kenaikan satu persen dana alokasi khusus akan menurunkan -2,494 persen indeks pembangunan manusia Kab/Kota di Provinsi Bengkulu. Dimana hasil dari pengujian hipotesis statistik t, nilai signifikannya sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Meskipun nilai pengujian hipotesis statistik t nya signifikan, tetapi nilai β_3 nya tidak searah dengan arah yang diajukan hipotesis, sehingga kesimpulannya pada pengujian hipotesis ketiga **ditolak**. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,517 mengindikasikan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar 51,7% dan sisanya sebesar 48,3% dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar model penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Bengkulu.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Bengkulu.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Bengkulu.

5.2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan Kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan observasi penelitian yang lebih luas dan menambah periode pengamatannya serta ruang lingkup penelitian ini bisa diperluas yaitu seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada variabel-variabel PAD, DAU dan DAK terhadap IPM tetapi juga bisa menambahkan variabel yang belum terdapat di penelitian ini, yaitu variabel Dana Bagi Hasil atau Belanja Modal sebagai variabel independennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram. Lombok.
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya, 2008-2012*. <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.
- Bau, Maria Yunitha. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Diy Tahun 2005-2009*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Bengkulu Exspress. 2014. *Bengkulu Masuk Daftar Provinsi dengan IPM Tertinggi*. <http://bengkuluekspress.com/bengkulu-masuk-daftar-provinsi-dengan-ipm-tertinggi/>. Diakses pada Jum'at, 17/10/2014.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Laporan Realisasi APBD, www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada Sabtu, 15/11/2014.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21*. Cetakan Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat*: Jakarta.
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, masalah dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Lugastoro, Dectra Pitron. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Universitas Brawijaya Malang.

Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Paking 23-26 Agustus 2006.

Mardiasmo, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.

Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008.

Rahmawati, Nur Indah. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Universitas Diponegoro Semarang.

Sembiring, Erika A. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara*. Tesis S2, Program Pascasarjana USU, Medan.

Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)*. Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi 7*. Jakarta: Erlangga.

UNDP. 1996. *Human Development Report*. Oxford University Press. New York

UNDP. 2004. *Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia*. <http://www.undp.or.id>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.

_____. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.

_____. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia